

Digitalisasi Administrasi Publik dalam Mewujudkan *Good Governance* di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Nazwa Nur Kamilla¹, Olivia Novianti²

¹²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nazwanurkamilla17@gmail.com, olivianoviyantyy@gmail.com

Keywords:

*Publik
Administration
Digitalization,
Good Governance,
Bureaucratic
Efficiency.*

Abstract:

This study aims to analyze the effectiveness of public administration digitalization at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of West Java Province in supporting good governance principles, as well as to identify existing challenges and optimization strategies. Using a descriptive-qualitative approach, data were collected through interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that digitalization has enhanced transparency and administrative efficiency but still faces obstacles such as low digital literacy among staff and poor system integration. Recommended strategies include staff training, integrated system development, and continuous evaluation. This study provides theoretical and practical contributions to the advancement of digital public administration within local legislative institutions to foster an adaptive, transparent, and accountable bureaucracy.

Kata Kunci:

*Digitalisasi
Administarsi Publik,
Good Governance,
Efisiensi Birokrasi.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas digitalisasi administrasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung prinsip good governance, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi optimalisasi sistem yang ada. Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital pegawai dan kurangnya integrasi antar sistem. Strategi yang dianjurkan mencakup pelatihan SDM, pengembangan sistem terintegrasi, dan evaluasi berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan administrasi digital di lingkungan legislatif daerah untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah memacu transformasi signifikan dalam praktik pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu strategi penting untuk memperbaiki kualitas tata kelola birokrasi yang selama ini kerap dihadapkan pada masalah inefisiensi

dan kurangnya transparansi. Dalam kerangka administrasi publik modern, digitalisasi administrasi dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat prinsip-prinsip good governance seperti efisiensi, akuntabilitas, dan keterbukaan (Lips, 2020; Osborne & Gaebler, 1993).

Sebagai entitas pendukung fungsi legislatif daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan administratif, teknis, dan keuangan bagi para anggota dewan. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini telah mulai mengadopsi sistem digital dalam berbagai proses kerja, mulai dari pengelolaan surat menyurat hingga pelaporan kinerja pegawai. Namun demikian, implementasi sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa hambatan masih ditemui, seperti rendahnya kemampuan digital di kalangan pegawai, keterbatasan dalam integrasi sistem antarbagian, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi dalam operasional administratif (Juliana, 2023; Setyasih, 2022).

Berbagai studi menunjukkan bahwa transformasi digital dalam birokrasi bukan hanya soal penyediaan teknologi, tetapi juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia, perencanaan sistem informasi yang terintegrasi, serta komitmen kelembagaan terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (Meijer & Bekkers, 2015; UNDP, 2014). Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD perlu merumuskan strategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa digitalisasi administrasi benar-benar berkontribusi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan administrasi digital di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan sistem administrasi. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparatur Sekretariat DPRD guna memahami dinamika kerja dan kendala dalam penggunaan sistem digital. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif terhadap pelaksanaan tugas administratif sehari-hari serta analisis terhadap dokumen kelembagaan, termasuk kebijakan internal dan laporan keuangan.

Data dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian deskriptif, dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan administrasi digital sebagai bagian dari implementasi prinsip good governance. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai praktik administrasi digital di Sekretariat DPRD serta rekomendasi praktis untuk memperkuat efektivitas dan integrasi sistem administrasi yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian, yaitu: sejauh mana efektivitas sistem administrasi digital yang diterapkan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat; apa saja kendala yang menghambat proses digitalisasi administrasi di lingkungan lembaga tersebut; serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk memperkuat efisiensi dan integrasi sistem administrasi digital secara menyeluruh. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas wacana mengenai administrasi publik berbasis digital, khususnya dalam konteks lembaga legislatif daerah yang selama ini belum banyak menjadi fokus kajian ilmiah. Sementara itu, secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan evaluatif bagi instansi terkait dalam menilai capaian dan tantangan implementasi digitalisasi administrasi, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan strategis guna memperkuat sistem birokrasi digital yang adaptif dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tinjauan Literatur

Digitalisasi administrasi publik merupakan proses transformasi sistem birokrasi tradisional menuju penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan dokumen, pelayanan, dan pengambilan keputusan publik. Konsep ini berakar dari gagasan e-government yang diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui teknologi digital (Lips, 2020). Dalam konteks ini, digitalisasi bukan hanya sekadar penggantian proses manual menjadi elektronik, melainkan juga mencakup perubahan struktural dan budaya organisasi birokrasi.

Administrasi publik digital juga sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan

partisipasi (UNDP, 2014). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang responsif dan mampu memenuhi tuntutan publik secara adil dan terbuka. Osborne dan Gaebler (1993) menyebut bahwa birokrasi yang modern harus mengadopsi pendekatan yang fleksibel, berorientasi pada hasil (outcome-based), serta didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi (Osborne & Gaebler, 1993).

Selain itu, konsep digital public administration menekankan pada pentingnya keterpaduan data dan interoperabilitas antar sistem pemerintahan. Meijer dan Bekkers (2015) mengembangkan metatheory of e-government yang menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi dalam sektor publik ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu kesiapan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi administrasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi pegawai, struktur organisasi, serta pola komunikasi antar unit (Meijer & Bekkers, 2015).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas implementasi digitalisasi administrasi dalam konteks pemerintahan daerah. Penelitian oleh Endang Try Setyasih (2021) menemukan bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak positif terhadap percepatan pelayanan publik dan peningkatan transparansi data. Namun, penelitian tersebut berfokus pada pelayanan publik eksternal dan belum menyentuh proses administratif internal lembaga legislatif secara khusus (Setyasih, 2022).

Ilham Juliana (2023) dalam penelitiannya mengenai digital public relations di Sekretariat DPRD Jawa Barat mengungkapkan bahwa penggunaan website institusi mampu meningkatkan keterbukaan informasi publik. Meskipun relevan, fokus penelitian ini terbatas pada komunikasi eksternal dan tidak secara mendalam mengevaluasi kinerja sistem administrasi internal dan integrasi antar platform digital yang digunakan oleh pegawai (Juliana, 2023).

Penelitian lainnya oleh Arif Kurnia (2023) menelaah penerapan good governance di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Studi tersebut menyoroti pentingnya akuntabilitas dan evaluasi kinerja, tetapi tidak mengaitkan secara langsung dengan aspek digitalisasi sistem administrasi (Kurnia, 2023). Di sisi lain, studi oleh Prasutra dan Septiani (2024)

menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi digitalisasi birokrasi adalah keterbatasan literasi digital pegawai dan tidak terintegrasinya sistem informasi, yang mengakibatkan duplikasi data dan keterlambatan akses informasi (Prasutra & Septiani, 2024).

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, ditemukan research gap yang jelas. Sebagian besar studi terdahulu belum secara komprehensif menelaah efektivitas digitalisasi administrasi publik di lingkungan lembaga legislatif, khususnya Sekretariat DPRD, dengan mengintegrasikan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan prinsip good governance. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada efektivitas implementasi sistem administrasi digital di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, serta merumuskan strategi integratif yang dapat memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi legislatif daerah.

Metode Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur atau pegawai yang bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi dan penggunaan sistem digital. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih partisipan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan topik penelitian. Kriteria informan meliputi pegawai struktural maupun staf pelaksana yang memahami sistem administrasi digital serta terlibat dalam aktivitas operasional administrasi harian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap pegawai Sekretariat DPRD untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses digitalisasi administrasi. Wawancara dirancang fleksibel agar informan dapat mengungkapkan pandangan secara terbuka, namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Kedua, dilakukan observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas administratif di lingkungan kerja untuk memahami alur kerja, pola koordinasi, serta kendala yang muncul dalam praktik digitalisasi. Observasi ini bertujuan menangkap realitas administratif secara faktual dan kontekstual (Miles et al., 2014). Ketiga, digunakan analisis dokumen, seperti peraturan internal, laporan keuangan, dokumen

pelaksanaan tugas, serta platform digital yang digunakan, guna melengkapi data primer dan memberikan landasan objektif atas proses administrasi yang berlangsung.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengorganisasikannya dalam bentuk tema dan kategori analisis. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan bagaimana digitalisasi administrasi diterapkan dalam mendukung prinsip good governance, seperti efisiensi proses kerja, transparansi informasi, serta akuntabilitas pelaporan. Pada tahap akhir, dilakukan interpretasi terhadap keseluruhan data untuk merumuskan pemahaman utuh mengenai efektivitas digitalisasi administrasi serta rekomendasi strategis bagi optimalisasi sistem di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi aktual implementasi digitalisasi administrasi publik di lingkungan legislatif daerah, serta menghasilkan rekomendasi praktis yang relevan dengan kebutuhan institusi. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan kombinasi teknik triangulasi (wawancara, observasi, dokumen) diharapkan dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Hasil Penelitian

Kondisi Penerapan Sistem Administrasi Digital di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya di Bagian Umum dan Administrasi, ditemukan bahwa implementasi sistem administrasi digital telah diterapkan dalam berbagai aspek operasional. Sistem digital yang digunakan meliputi platform siap.jabarprov.go.id untuk pelaporan kinerja ASN, sistem pengelolaan surat menyurat elektronik, dan aplikasi kinerja.jabar.prov untuk evaluasi kinerja pegawai.

Observasi menunjukkan bahwa proses pengelolaan dokumen administrasi telah mengalami transformasi dari sistem manual ke digital. Kegiatan seperti pengelompokan disposisi surat masuk dan keluar, penyusunan arsip berdasarkan klasifikasi, serta input data pensiun PNS telah terintegrasi dengan sistem digital. Namun, tingkat pemanfaatan sistem ini masih bervariasi antar bagian dan individu pegawai.

Tabel 1.1 Ringkasan Sistem Digital yang Diterapkan

Nama Sistem	Fungsi Utama	Status Implementasi	Tingkat Pemanfaatan
siap.jabarprov.go.id	Pelaporan kinerja ASN	Terimplementasi	Bervariasi antar pegawai
Sistem Surat Elektronik	Pengelolaan surat menyurat	Terimplementasi	Tinggi
kinerja.jabar.prov	Evaluasi kinerja pegawai	Terimplementasi	Sedang
dprd.jabarprov.go.id	Informasi publik & layanan	Terimplementasi	Tinggi
Sistem Arsip Digital	Pengelompokan & klasifikasi dokumen	Parsial	Sedang

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Efektivitas Sistem Digital dalam Mendukung Prinsip Good Governance

Dari segi transparansi, sistem digital telah memungkinkan akses informasi yang lebih terbuka, terutama melalui website dprd.jabarprov.go.id yang menyediakan informasi kegiatan DPRD dan layanan publik. Aspek akuntabilitas terlihat dari implementasi sistem pelaporan kinerja ASN yang memungkinkan monitoring dan evaluasi secara real-time.

Efisiensi administrasi mengalami peningkatan dalam beberapa aspek, seperti percepatan proses pengelolaan dokumen dan kemudahan akses data. Namun, observasi

menunjukkan bahwa masih terdapat redundansi dalam beberapa proses akibat kurangnya integrasi antar-platform.

Kendala dalam Implementasi Sistem Administrasi Digital

Observasi mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam implementasi sistem administrasi digital:

1. Keterbatasan Literasi Digital Pegawai: Sebagian pegawai masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital yang ada, terutama dalam pemanfaatan fitur-fitur advanced dari platform yang tersedia.
2. Kurangnya Integrasi Sistem: Berbagai platform digital yang digunakan (siap.jabarprov.go.id, kinerja.jabar.prov, dan sistem internal lainnya) masih berjalan secara terpisah tanpa konektivitas yang optimal.
3. Kendala Teknis: Ditemukan adanya keterlambatan akses sistem, gangguan konektivitas, dan keterbatasan infrastruktur teknologi yang mempengaruhi efektivitas kerja.
4. Minimnya Sosialisasi: Kurangnya sosialisasi terkait pembaruan sistem dan fitur-fitur baru menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan teknologi yang tersedia.

Strategi yang Diterapkan untuk Mengatasi Kendala

Berdasarkan observasi, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, meskipun belum dilaksanakan secara sistematis:

1. Pemberian bimbingan informal antar pegawai dalam penggunaan sistem digital
2. Penyediaan panduan teknis untuk aplikasi tertentu
3. Koordinasi dengan unit IT untuk penyelesaian masalah teknis
4. Evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem yang digunakan

Diskusi

Implementasi Digitalisasi Administrasi dalam Konteks Good Governance

Temuan observasi menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah berkontribusi positif terhadap implementasi prinsip-prinsip good governance, meskipun belum optimal. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Lips (2020) bahwa digitalisasi administrasi publik dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi ketika diterapkan dengan tepat.

Peningkatan transparansi terlihat dari implementasi website institusi dan sistem pelaporan digital yang memungkinkan akses informasi publik yang lebih terbuka. Temuan ini mendukung hasil penelitian Juliana (2023) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital dapat meningkatkan keterbukaan informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam good governance.

Dari aspek akuntabilitas, implementasi sistem pelaporan kinerja ASN melalui platform digital telah memperkuat mekanisme pertanggungjawaban. Hal ini selaras dengan teori Bovens (2018) yang menekankan bahwa akuntabilitas dalam birokrasi dapat dicapai melalui sistem digitalisasi yang mendukung pencatatan administratif yang akurat dan transparan.

Tantangan dalam Optimalisasi Sistem Digital

Kendala utama yang ditemukan dalam observasi adalah keterbatasan literasi digital pegawai dan kurangnya integrasi sistem. Temuan ini konsisten dengan penelitian Prasutra dan Septiani (2024) yang mengidentifikasi hambatan serupa dalam implementasi digitalisasi birokrasi di berbagai instansi pemerintah.

Kurangnya integrasi antar-platform digital yang diamati sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Meijer dan Bekkers (2015) dalam metatheory of e-government, yang menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi memerlukan interoperabilitas sistem dan keterpaduan data. Fragmentasi sistem yang ditemukan dalam observasi mengakibatkan duplikasi data dan ketidakefisienan proses administratif.

Kendala teknis seperti keterlambatan akses dan gangguan sistem menunjukkan perlunya investasi infrastruktur teknologi yang lebih memadai. Hal ini mendukung argumen Heeks (2020) bahwa implementasi digitalisasi dalam administrasi publik harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang solid dan berkelanjutan.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat gagasan bahwa digitalisasi administrasi publik bukan hanya soal adopsi teknologi, tetapi juga transformasi budaya organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan konsep digital public administration yang menekankan pentingnya aspek manusia dalam kesuksesan transformasi digital (Osborne & Gaebler, 1993).

Secara praktis, hasil observasi memberikan gambaran nyata tentang kondisi implementasi digitalisasi di lembaga legislatif daerah. Temuan ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi Sekretariat DPRD dalam merancang strategi optimalisasi sistem administrasi digital yang lebih efektif.

Strategi Optimalisasi Berdasarkan Temuan

Berdasarkan kendala yang ditemukan, beberapa strategi optimalisasi dapat dirumuskan:

1. Penguatan Kapasitas SDM: Diperlukan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital pegawai, sesuai dengan rekomendasi UNDP (2014) tentang pentingnya pengembangan kapasitas dalam transformasi digital pemerintah.
2. Integrasi Sistem: Pengembangan sistem administrasi terpadu yang dapat menghubungkan berbagai platform digital yang ada, sejalan dengan prinsip interoperabilitas dalam e-government.
3. Peningkatan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung stabilitas dan kecepatan akses sistem digital.

4. Evaluasi Berkelanjutan: Implementasi mekanisme evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas sistem digital dalam mendukung prinsip good governance.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: fokus observasi yang terbatas pada Bagian Umum dan Administrasi sehingga belum mencakup seluruh unit kerja di Sekretariat DPRD; periode observasi yang relatif singkat sehingga mungkin belum menangkap variasi kondisi dalam periode yang lebih panjang; dan keterbatasan akses terhadap beberapa sistem internal yang bersifat rahasia atau terbatas.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak digitalisasi administrasi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Selain itu, studi komparatif dengan sekretariat DPRD provinsi lain dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang best practices dalam implementasi administrasi digital di lembaga legislatif daerah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar dalam mewujudkan good governance, khususnya dalam aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan literasi digital pegawai, integrasi sistem yang belum optimal, serta lemahnya komitmen kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam birokrasi legislatif daerah.

Daftar Pustaka

Juliana, I. (2023). *Pengelolaan Digital Public Relations Pada Website Dprd.jabarprov.go.id*

- Sebagai Bagian Dari Good Governance*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Kurnia, A. (2023). *Implementasi Good Governance pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi*.
- Lips, M. (2020). *Digital Government: Managing Public Sector Reform in the Digital Era* (1st ed.). Routledge.
- Meijer, A., & Bekkers, V. (2015). A metatheory of e-government: Creating some order in a fragmented research field. *Government Information Quarterly*.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.04.006>
- Miles, M. B., Uberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. In *SAGE Publication* (3rd ed.).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1993). *Reviewed Works: Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Penguin Publishing Group.
<https://doi.org/10.2307/258896>
- Prasutra, D. F., & Septiani, S. (2024). *Implementasi Kebijakan E-Government dalam Administrasi Kepegawaian*. 1(3), 107–119.
- Setyasih, E. T. (2022). Transformasi Digital Pemerintah Daerah Di Era Society 5.0: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(3), 59–66. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i3.657>
- UNDP. (2014). Reflexive governance for sustainable development. *UNDP, March 2014*, 1–457. <https://doi.org/10.4337/9781847200266>